

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN PETAMBAK UDANG
DI KECAMATAN KAWUNGAN TEN OLEH DINAS PERIKANAN
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH**

Neno Putri Baminggen

NPP. 29.1803

Asdaf Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 29.1803@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The inability of the community to manage and develop the available resources is the main cause of the problem of poverty in Indonesia. Empowerment of shrimp farming fishing communities as an effort to improve community welfare in Kawunganten District includes counseling and providing capital assistance and distribution is not optimal due to various limitations. Purpose:* This study aims to determine how the empowerment of shrimp farming fishing communities in Kawunganten District is carried out by the Fisheries Service of Cilacap Regency along with the supporting and inhibiting factors in it. **Method:** This study uses descriptive method and analysis of the empowerment according to ACTORS Theory uses Government Regulation Number 50 of 2015 concerning Empowerment of Small Fishermen and Small Fish Cultivators and the ACTORS theory of Sarah Cook and Steve Macaulay which is analyzed with the dimensions of Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunities, Responsibilities, Support. The technique of collecting data are done by purposive sampling, interviews (10 informant), and documentation. **Result:** The results showed that the Empowerment of Shrimp Farmers Fishermen in Kawunganten District by the Fisheries Service of Cilacap Regency based on theory and regulations went well. This is evidenced by the independence and work spirit of the shrimp farming fishing community to develop their business by enthusiastically participating in various empowerment activities. **Conclusion:** Empowerment of Shrimp Farmers Fishermen in Kawunganten District by the Fisheries Service of Cilacap Regency went optimal. In order to increase youth participation, it is recommended to optimize resources and collaborate with various components including entrepreneurs.

Keywords: *Poverty; Shrimp Farmers Fisherman; Empowerment*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang tersedia menjadi penyebab utama masalah kemiskinan di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kawunganten meliputi penyuluhan dan pemberian bantuan modal serta distribusi belum optimal karena berbagai keterbatasan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap beserta dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ditemui. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

kualitatif dengan metode deskriptif serta dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dan teori *ACTORS* dari Sarah Cook dan Steve Macaulay yang dianalisis dengan dimensi *Authority* (wewenang), *Confidence and competence* (Rasa percaya diri dan kemampuan), *Trust* (Kepercayaan), *Opportunities* (Kesempatan), *Responsibilities* (Tanggungjawab), *Support* (Dukungan). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *purposive sampling* melalui wawancara mendalam (10 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pemberdayaan Nelayan Petambak Udang di Kecamatan Kawunganten Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap berdasarkan teori dan peraturan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemandirian dan semangat kerja masyarakat nelayan petambak udang untuk mengembangkan usaha mereka dengan secara antusias mengikuti berbagai kegiatan pemberdayaan. **Kesimpulan:** Pemberdayaan Nelayan Petambak Udang di Kecamatan Kawunganten Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap berdasarkan teori dan peraturan berjalan dengan optimal. Guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten, disarankan untuk mengoptimalkan sumber daya serta berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausahawan.

Kata kunci: Kemiskinan; Nelayan Petambak Udang; Pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah utama di banyak negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya yang tersedia menjadi penyebab utama masalah kemiskinan.

Dilihat dari kontribusi perikanan di Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cilacap pada Tahun 2020 yakni sebesar 10,01% berada di urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Pada potensi perikanan umum darat (PUD). Kecamatan Kawunganten memiliki luas wilayah tambak udang yang cukup luas yakni seluas 110 Ha. Dengan kondisi geografis yang dekat dengan perairan samudera Hindia, kegiatan budidaya udang tentu bukan merupakan hal yang sulit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa terdapat 364 orang yang berprofesi sebagai nelayan yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Kawunganten. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dalam terus berusaha untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan petambak udang melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kawunganten yang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun dimulai sejak tahun 2019 dan diikuti sebanyak 291 nelayan yang tergabung dalam beberapa kelompok nelayan petambak udang. Sumber pendanaan kegiatan pemberdayaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap dan juga kerjasama dengan BUMDes ataupun Koperasi Unit Daerah (KUD).

Akan tetapi tidak lengkapnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan petambak udang justru berbanding terbalik sehingga berdampak pada jumlah produksi udang masyarakat nelayan petambak udang di kecamatan kawunganten yang terus menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap belum dapat terlaksana dengan baik.

Sektor perikanan harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena hampir sebagian besar komoditi ekspor yang cukup menguntungkan adalah udang dan berbagai jenis ikan. Contohnya adalah salah satu jenis budidaya berupa Udang Vaname memiliki dengan jumlah produksi 2000 ton per tahun memiliki nilai jual yang sangat tinggi yakni dikisaran harga Rp.130.000,---Rp.150.000,- per

kilogramnya berdasarkan berita yang diperoleh melalui situs internet. Hal ini tentu menjadi potensi yang baik bagi Kecamatan Kawunganten bahkan Kabupaten Cilacap di masa yang akan datang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Pemberdayaan nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten ini. Diantaranya adalah pemberian penyuluhan bagi nelayan terkait dengan metode pembudidayaan udang ataupun penyuluhan tentang teknologi baru dalam pembudidayaan udang di Kecamatan Kawunganten yang diperoleh melalui penyuluh dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Yang pada pelaksanaannya dinilai masih ada hambatan yakni keterbatasan tenaga penyuluh sehingga beberapa desa di Kecamatan Kawunganten belum bisa mendapatkan penyuluhan berkaitan dengan kegiatan budidaya udang; Pemberian bantuan kemudahan memperoleh benih dan keperluan nelayan melalui program Kartu Pelaku Usaha Kelautan (KUSUKA) dan Perikanan dan juga pengurusan perizinan untuk mendirikan usaha tambak bagi nelayan petambak udang. Namun, pada kegiatan pemberian kartu KUSUKA pada masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten belum sepenuhnya terealisasikan. Dari total 364 orang nelayan petambak orang yang terdaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut, hanya sekitar 232 orang nelayan saja yang sudah menerima kartu dan memanfaatkannya untuk membantu kegiatan pembudidayaan udang di Kecamatan Kawunganten. Hal ini tentu membuktikan bahwa ada lebih dari 50% nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten yang belum bisa merasakan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka; Bantuan permodalan dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan melalui kerjasama dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Cilacap dengan cara pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di setiap desa di Kecamatan Kawunganten untuk membantu nelayan dalam pemenuhan keperluan kegiatan budidaya. Hanya saja pada pelaksanaan program ini keberadaan KUD di Desa tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karena kurangnya pemahaman bagaimana prosedur untuk memperoleh bantuan guna kegiatan budidaya udang; Bantuan pendistribusian pemasaran hasil produksi melalui Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) dengan cara mempermudah akses izin masuk dan keluar kapal-kapal, dan juga kerjasama dengan Koperasi Unit Daerah (KUD) dengan membantu permodalan pengepul ikan sehingga para pengepul dapat mendistribusikan hasil nelayan ke daerah lain seperti Jakarta dan sekitarnya dan bahkan hingga ke mancanegara seperti negara Jepang dan Korea Selatan. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya kegiatan pengawasan pasca pembangunan PPSC yang ternyata tiap harinya terus mengalami pendangkalan sehingga mengurangi jumlah kapal yang dapat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu berdampak pada proses distribusi hasil budidaya udang di Kecamatan Kawunganten menjadi tidak optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan maupun konteks kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian Windasai, Mohammad Mas'ud Said, dan Hayat berjudul "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep", menemukan bahwa Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan yakni sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator melalui kegiatan pembentukan kelembagaan nelayan untuk mendukung bantuan permodalan dan pemasaran atau pengolahan ikan serta pengembangan sarana dan prasarana belum optimal. Faktor pendukung dalam pemberdayaan ini adalah adanya peningkatan pola pikir masyarakat (Windasai, Mohammad Mas'ud Said, 2015). Penelitian Dewi, Berkaitan dengan teori Actors, Cook dan Macaulay mengatakan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan perubahan yang bersifat terencana karena input yang digunakan dalam perubahan sudah diantisipasi sejak dini sehingga output

yang dihasilkan akan berdayaguna optimal. Pada program Balkondes Sakapitu input belum berjalan baik sehingga output yang dihasilkan belum optimal (Dewi, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Dias Nilasari, tentang Pemberdayaan masyarakat pesisir oleh Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan bantuan modal usaha, dan bekerja sama dengan Perusahaan PT. Vale memberikan bantuan modal dengan dana bergulir dan dana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat (PTPM) yang diberikan kepada masyarakat (Nilasari, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten yang adalah program pemerintah daerah yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, teori yang digunakan juga berbeda dengan penelitian Windasai dkk, dan Dewi. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sarah Cook dan Steve Macaulay (Sarah Cook&Steve Macaulay, 1997) yang menyatakan bahwa optimal atau tidaknya pemberdayaan dapat dinilai dari beberapa dimensi yang disebut dengan ACTORS yang terdiri dari dimensi *Authority* (wewenang), *Confidence and competence* (Rasa percaya diri dan kemampuan), *Trust* (Kepercayaan), *Opportunities* (Kesempatan), *Responsibilities* (Tanggungjawab), *Support* (Dukungan).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan bagi masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten yang dilakukan serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambatnya serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan menganalisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan kemudian membuat kesimpulan, Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (Sugiyono, 2012). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM), Kepala Bidang Pemberdayaan, Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro DPKUKM Kabupaten Cilacap, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, Ketua kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan dan masyarakat nelayan petambak udang (sebanyak 4 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten menggunakan pendapat dari Cook dan Macaulay yang menyatakan bahwa optimal atau tidaknya pemberdayaan dapat dinilai dari beberapa dimensi yang disebut dengan ACTORS yang terdiri dari dimensi *Authority* (wewenang), *Confidence and competence* (Rasa percaya diri dan kemampuan), *Trust* (Kepercayaan), *Opportunities* (Kesempatan), *Responsibilities* (Tanggungjawab), *Support* (Dukungan). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Petambak Udang di Kecamatan Kawunganten Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Dari Perspektif Legalistik

Penulis melakukan analisa pada Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Petambak Udang di Kecamatan Kawunganten Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah secara legalistik menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yakni melalui kegiatan penyuluhan terkait tata cara pembudidayaan dan pengelolaan usaha tambak udang dan juga kemitraan dengan para pelaku usaha perikanan. Kegiatan berikutnya adalah pemberian bantuan modal usaha tambak dari Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai bentuk kemitraan antara Dinas Perikanan, Pemerintah Desa dan juga masyarakat nelayan petambak udang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang ada.

3.2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Petambak Udang di Kecamatan Kawunganten Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Dari Perspektif Teoretis

Penulis melakukan analisa pada Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Petambak Udang di Kecamatan Kawunganten Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah secara legalistik menggunakan teori ACTORS menurut Cook dan Macaulay sehingga pemberdayaan nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten secara Authority (kewenangan) yakni pengelolaan KUB berkaitan dengan sistem organisasi dan kerja sepenuhnya ada di tangan masyarakat. Dilihat dari dimensi Confidence and Competence (Rasa Percaya Diri dan Kemampuan) berkaitan dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kecamatan Kawunganten merupakan usaha masyarakat yang yakin dan percaya akan suatu bentuk kerjasama membuktikan bahwa keyakinan dan kemampuan masyarakat baik dalam mengembangkan usaha perikanan. Apabila ditinjau dari dimensi Trust (kepercayaan), tingkat partisipasi dan juga antusiasme yang baik dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap membuktikan bahwa masyarakat dapat diberi kepercayaan. Dilihat dari dimensi Opportunities (kesempatan), dalam hal pemberian bantuan pengembangan usaha, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten yakni dengan bantuan permodalan melalui Kartu (Pelaku Usaha Kelautan) KUSUKA nelayan yang dapat diperoleh melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo. Sedangkan bila dilihat dari dimensi Responsibility (tanggung jawab), dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap maupun masyarakat nelayan belum optimal karena kondisi Pelabuhan PPSC yang terus mengalami pendangkalan sehingga mengurangi jumlah kapal yang dapat masuk ke pelabuhan dan berpotensi mengurangi jumlah distribusi udang di Kecamatan Kawunganten. Berbeda lagi jika dilihat dari dimensi Support (dukungan) yang diberikan dari Dinas Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten adalah berupa pelayanan yang prima dan cepat apabila diperlukan serta siap membantu apabila dalam kegiatan pengembangan usaha tambak masyarakat nelayan mengalami kesulitan dan dukungan dari antar masyarakat nelayan adalah dengan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan maka terjalin kerjasama dan solidaritas yang kuat.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Pemberdayaan bagi masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten memberikan banyak dampak positif di dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dan juga ekonomi masyarakat Kabupaten Cilacap. Pemberdayaan juga merupakan salah satu sarana pengembangan pengetahuan dan potensi bagi nelayan petambak udang dan juga pelaku usaha lainnya di bidang perikanan yang ada di Kecamatan Kawunganten. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat nelayan petambak udang berpartisipasi dengan baik dikarenakan adanya solidaritas dan

keinginan masyarakat sendiri untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pengembangan usaha, serta kerjasama yang baik dari pemerintah setempat dan komunitas pemudanya, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Sama halnya dengan temuan Dewi bahwa partisipasi masyarakat Desa Tegalarum bersifat aktif melalui perwakilan dari sebagian masyarakat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (Dewi, 2020).

Layaknya program lainnya, program pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten ini juga masih memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat, diantaranya adalah: (1) Ketersediaan modal untuk pengembangan usaha tambak udang; (2) Semangat dan solidaritas masyarakat yang cukup tinggi. Dengan hambatan yang dihadapi yakni: (1) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam kegiatan penyuluhan; (2) Belum ada regulasi/aturan tentang Lalu lintas Kapal di Pelabuhan PPSC Cilacap; (3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam pengajuan bantuan; (4) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan petambak udang; (5) Serta lokasi geografis tempat tinggal masyarakat nelayan petambak udang yang jauh. Layaknya temuan Windasai dkk (Windasai, Mohammad Mas'ud Said, 2015). Selanjutnya bentuk dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat nelayan, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah alokasi anggaran dan dukungan oleh pihak pemerintah, swasta dan atau pihak berkepentingan sehingga mampu menyelenggarakan program dengan baik. Hal ini yang membuat masyarakat nelayan petambak udang semangat dan dengan senang hati untuk berpartisipasi mengembangkan usaha tambak udang dengan berbagai kreasi dan saling bergotong royong memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sesuai dengan hasil penelitian Dias Nilasari (Nilasari, 2017).

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan petambak udang, para pelaku usaha perikanan lainnya dan juga berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Cilacap.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten ini yakni kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap hal-hal yang bersifat teknis seperti regulasi lalu lintas di Pelabuhan PPSC Cilacap sehingga menghambat proses distribusi hasil perikanan keluar daerah Cilacap.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kawunganten telah optimal dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan yang pemerintah setempat melalui berbagai kelompok nelayan dan koperasi. Selain mengandalkan semangat dan solidaritas masyarakat nelayan petambak udang sebagai kunci berjalannya program, perihal kolaborasi bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Cilacap juga menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian. Guna meningkatkan optimalisasi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Kawunganten, disarankan untuk mengoptimalkan sumber daya serta berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk wirausahawan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cook dan Macaulay.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat nelayan petambak udang di Kecamatan Kwwunganten untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan Camat Kawunganten beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. F. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Balkondes (Balai Ekonomi Desa) : Studi Kasus di Balkondes Sakapitu, Desa Tegalarum, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang* [Universitas Negeri Semarang]. [http://lib.unnes.ac.id/42377/1/3401416076_Sintya F Dewi_Pend. Sosan.pdf](http://lib.unnes.ac.id/42377/1/3401416076_Sintya_F_Dewi_Pend_Sosan.pdf)
- Nilasari, D. (2017). *Analisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur* [Universitas Hasanuddin]. <https://core.ac.uk/download/pdf/83870788.pdf>
- Sarah Cook&Steve Macaulay. (1997). *Perfect Empewermant*. PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Windsai, Mohammad Mas'ud Said, dan H. (2015). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Di Kepulauan Salembu Kabupaten Sumenep). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Di Kepulauan Salembu Kabupaten Sumenep)*. <https://media.neliti.com/media/publications/116481-ID-pengembangan-model-pemberdayaan-bagi-pen.pdf>

